
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance

Ketut Tanti Kustina*, Agung Gede Wikantara, I Gusti Ayu Diah Utari dan Desak Made Sukarnasih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Bali-Indonesia

*tantikustina@undiknas.ac.id

How to cite (in APA style):

Kustina, K. T., Wikantra, A. G., Utari, I. G. A. D., & Sukarnasih, D. M (2022). Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 21(2), pp.212-225. <https://doi.org/10.22225/we.21.2.2022.212-225>

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of professionalism and independence of internal auditors on the implementation of good government governance (GGG) in the Regional Government of Bali Province. The population of this study was 57 auditor samples used were 45. The source of the data used is primary data with the sampling method is saturated sampling method. Data collection techniques using a questionnaire (questionnaire) distributed at the Inspectorate of the Province of Bali. The analysis in this study conducted a descriptive analysis. Descriptive analysis looks at respondent characteristic data and descriptive data. In the test instrument all indicators are declared valid and reliable, then proceed with the classic assumption test the entire data meets the qualifications required in the hypothesis test. The coefficient of determination of the model is 46.8% which can be explained in the model and 53.2% is explained outside the model, then a partial test of 0.043 professionalism and 0.005 independence has a significant positive effect on good government governance.

Keywords: professionalism; independence; good government governance.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profesionalisme dan independensi auditor internal terhadap penerapan good government governance (GGG) di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali. Populasi dari penelitian ini adalah 57 auditor sampel yang digunakan adalah 45. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengambilan sampelnya adalah dengan metode sampling jenuh. Teknik pengumpulan data dengan angket (kuesioner) yang disebar di Inspektorat Provinsi Bali. Analisis dalam penelitian ini melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif melihat data karakteristik responden dan data deskriptif. Dalam uji instrumen seluruh indikator dinyatakan valid dan reliabel, lalu dilanjutkan uji asumsi klasik keseluruhan data memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam uji hipotesis. Koefisien determinasi dari model adalah 46,8% yang dapat dijelaskan dalam model dan 53,2% dijelaskan diluar model, lalu uji parsial profesionalisme 0,043 dan independensi 0,005 berpengaruh positif secara signifikan terhadap good government governance.

Kata Kunci: profesionalisme; independensi; good government governance

I. PENDAHULUAN

Auditor Internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya dengan memberikan opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Semakin auditor internal menyadari akan tanggung jawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi.

Audit dapat dikatakan berkualitas jika auditor internal menetapkan pedoman praktik audit dalam segala aktifitasnya. Bila dilihat mengenai kualitas audit dan banyaknya kasus kelemahan Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Pemerintah Daerah (PEMDA) maka dapat dikatakan kualitas audit di pemerintah daerah masih kurang karena dalam pelaksanaan audit, auditor internal belum mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Berkaitan dengan kinerja, kurangnya pengawasan internal masih dirasakan bagi beberapa PEMDA di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pada kasus semester I 2013, kelemahan Sistem Pengendalian Intern RP.46,24

Triliun dengan potensi kerugian sebesar Rp.10,74 Triliun. BPK juga menemukan 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dengan senilai Rp.56,98 Triliun. Dalam periode 2009 hingga semester I 2013 terdapat 193.600 rekomendasi senilai Rp.73,27 Triliun. Jumlah itu mencakup keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) badan hukum milik negara, kontraktor kontrak kerja sama, lembaga yang memiliki saham pemerintah 50% (Media Indonesia: 12 November 2013).

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 14.997 permasalahan yang berdampak finansial hingga Rp 27,397 triliun dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan yang diselesaikan. Temuan tersebut terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017. "Ini merupakan ikhtisar dari laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 113 LHP pada pemerintah pusat, 537 LHP pemerintah daerah, dan 37 LHP BUMN. BPK mengaudit 645 laporan keuangan, 9 laporan kinerja, dan 33 laporan dengan tujuan tertentu sepanjang semester pertama tahun ini. Dari pemeriksaan tersebut, tercatat terdapat 9.729 temuan dengan 14.997 permasalahan yang terkategori atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketidakhematan dan ketidakefisienan BPK mengumpulkan 4.707 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp 25,14 triliun yang mengakibatkan potensi kerugian, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi. (Tempo: 3 Oktober 2017)

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah selama satu periode yaitu dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah diwajibkan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 (RI, 2010) Tujuan diterapkannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan peningkatan kualitas informasi laporan keuangan, dikarenakan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *Good Government Governance* di Indonesia semakin meningkat dan tuntutan ini dianggap wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*), buruknya birokrasi dapat dilihat dari permasalahan yang ditemui pada masyarakat misalnya dari segi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut (Indra, 2019) sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal dan lain sebagainya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur.

Menurut (Mardiasmo, 2005) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah selaku auditor internal pemerintah daerah.

Sejalan dengan beberapa masalah yang ditemui dalam penyelenggaraan birokrasi di pemerintahan daerah dibutuhkan sebuah fungsi auditor internal yang profesional dan independen. Fungsi Auditor Internal dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Selama ini tugas - tugas yang dilaksanakan oleh audit internal pemerintah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal yang dikehendaki pada saat ini, yang masih kurang dianggap penting peran dan arti audit internal pemerintah dalam membantu terwujudnya *good government governace* pada Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.

Menurut (Astuti, 2016) bahwa efektivitas fungsi audit internal secara umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good government governance* pada pemerintah daerah. Semakin efektif pelaksanaan fungsi audit internal melalui perencanaan yang baik, komunikasi dan koordinasi, serta pengelolaan sumber daya yang baik maka pelaksanaan *good government governance* yang diterapkan pada pemerintah daerah atau organisasi akan menjadi akuntabel, transparansi sesuai pada prinsip dari *good government governance*.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Rahmatika, 2014) mengemukakan hasil penelitiannya sebagai berikut tidak ada perbedaan yang signifikan antara efektivitas audit internal, kualitas pelaporan keuangan dan *good governance* di pemerintah daerah. Efektivitas fungsi audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Fungsi audit internal berpengaruh signifikan terhadap aplikasi tata kelola pemerintahan yang baik dan yang terakhir, kualitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap aplikasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, penulis tertarik melakukan penelitian tentang *good government governance* dengan variabel bebas yang berbeda dari peneliti sebelumnya, meskipun pemerintahan Daerah Provinsi Bali di tahun 2018 memperoleh predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang keenam secara berturut-turut, tidak serta merta dalam penyelenggaraan birokrasi terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka dituntutlah seorang Auditor Internal memiliki sikap profesionalisme dan independensi yang kuat dalam menjalankan *good government governance* di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme dan independensi auditor internal pada penerapan *good government governance* dan dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut;

Apakah ada pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap penerapan *good government governance* di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali?

Apakah ada pengaruh independensi Auditor Internal terhadap penerapan *good government governance* di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali?

II. KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori Atribusi menurut Fritz Heider merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti sifat, karakter, sikap, dll dan faktor eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi menjelaskan terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*. (Luthans, 2005). *Dispositional attributions* atau penyebab internal mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri yang dalam penelitian adalah profesionalisme dan independensi.

Teori Agensi

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. (Eisenhardt, 1989) menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu, asumsi sifat manusia (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), serta asumsi informasi (*information assumptions*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu, 1) *Self interest*, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri, 2) *Bounded-rationality* , yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan 3) *Risk aversion*, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) Konflik sebagai tujuan antar partisipan, (2) Efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, serta (3) Asimetri informasi antara pemilik dan agen

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat).

Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi *information asymmetry*. Berdasar *Agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

Professionalisme

Pengertian profesionalisme menurut (Fiedler et al., 2012) merupakan tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Masyarakat mengharapkan tingkat profesionalisme yang tinggi dari Auditor Internal, harapan ini muncul dari apa yang menjadi tradisi keunggulan dalam profesi. Auditor Internal memiliki upaya yang signifikan untuk menetapkan dan mempertahankan standar yang tinggi untuk profesi dan untuk membentuk internal audit sebagai fungsi manajemen kunci dalam operasi sukses dari organisasi mereka.

Independensi

Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang dicirikan oleh endekatan integritas dan obyektivitas tugas profesionalnya. Hal ini senada dengan *America Institute of Certified public Accountant (AICPA)* menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. Meskipun integritas dan obyektivitas tidak dapat diukur dengan pasti, tetapi keduanya merupakan hal yang mendasar bagi profesi akuntan publik. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya.

Good Government Governance

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program (UNDP)* memberikan pengertian *good governance* sebagai berikut : “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjebatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Sementara itu *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi

pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam *Good Corporate Governance* di BUMN terdapat lima prinsip utama. Kelima prinsip tersebut adalah: (1) *Transparency* (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan (2) *Accountability* (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (3) *Responsibility* (pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku (4) *Fairness* (kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (5) *Independency* (Kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Auditor Internal

Menurut (Mulyadi, 2014), audit internal adalah sebagai berikut:

“Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

Hipotesis

Pengaruh Variabel Profesionalisme terhadap Good Government Governance

Masyarakat mengharapkan tingkat profesionalisme yang tinggi dari Auditor Internal, harapan ini muncul dari apa yang menjadi tradisi keunggulan dalam profesi. Auditor Internal memiliki upaya yang signifikan untuk menetapkan dan mempertahankan standar yang tinggi untuk profesi dan untuk membentuk internal audit sebagai fungsi manajemen kunci dalam operasi sukses dari organisasi mereka.

Menurut (Rachmadias, & Fitriyah, 2019) mengungkapkan adanya pengaruh profesionalisme yang signifikan terhadap Good Corporate Governance di 5 BUMN yang ada di Bandung, dengan begitu pengelolaan perusahaan tersebut sudah berjalan dengan baik. Hal senada juga dijelaskan oleh (Budiningsih dkk, 2016) profesionalisme Auditor Internal berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance di BPR yang ada di Jawa Tengah. Menurut Noviatini dan Rahayu yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara profesionalisme Auditor Internal dengan efektivitas Good Corporate Governance di PT Pos Indonesia Bandung. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.:

H1: Profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap good government governance

Pengaruh Variabel Independensi terhadap Good Government Governance

Independensi adalah kebebasan posisi auditor baik dalam sikap maupun penampilan dalam hubungannya dengan pihak lain yang terkait dengan tugas audit yang dilaksanakannya bersama audite (PEMDA). Pelaporan yang independen berarti pelaporan yang tidak terpengaruh pihak lain,

mengungkapkan temuan apa adanya sehingga hasil dari temuan audit dapat dipertanggungjawabkan. Standar Auditing Seksi 220 menyatakan bahwa independensi diukur dari sikap tidak memihak, bebas kewajiban terhadap klien dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya.

Menurut (Rachmadias, & Fitriyah, 2019) mengungkapkan adanya pengaruh Independensi yang signifikan terhadap Good Corporate Governance di 5 BUMN yang ada di Bandung, lebih lanjut dijelaskan oleh (Budiningsih dkk, 2016) Independensi Auditor Internal berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance di BPR yang ada di Jawa Tengah. Hasil penelitian dari (Sumadyo, 2010) menyatakan bahwa independensi Auditor Internal berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut..

H2: Independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good government governance*.

III. METODE

Lokasi penelitian pada di Kantor Inspektorat Provinsi. Alasan peneliti memilih objek tersebut karena dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, instansi tersebut bersinggungan langsung dengan kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Inspektorat berperan sebagai pengawasan dan pemeriksaan terhadap tata kelola Pemerintahan Provinsi Bali. Objek dari penelitian ini adalah seseorang yang berprofesi dan aktif sebagai Auditor Internal. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Auditor Internal Pemerintah Provinsi Bali yaitu seluruh auditor yang ada di Inspektorat Provinsi Bali yang beranggotakan 57 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel Sugiyono, (2016: 85). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2016:225) menjelaskan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara sebagai uji pendahuluan terhadap penentuan populasi dan sampel, materi penelitian terhadap responden, dan pemilihan metode yang digunakan. Metode wawancara ini sebagai metode awal (uji pendahuluan) seorang peneliti untuk memastikan penelitian ini bisa berjalan atau tidak, namun data hasil wawancara sudah dimasukkan sebagai pendukung pelaksanaan penelitian ini. Statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diuji pada setiap hipotesis dengan menghitung mean (rata-rata), standar deviasi serta nilai maksimum dan minimum variabel. Analisis deskriptif melihat data karakteristik responden dan data deskriptif. Dalam uji instrumen seluruh indikator dinyatakan valid dan reliabel, lalu dilanjutkan uji asumsi klasik keseluruhan data memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam uji hipotesis. Metode uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t, dengan menetapkan uji signifikan terhadap variabel independen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistika Deskriptif

Analisis data yang disajikan dalam penelitian ini meliputi harga rata-rata *Mean* (M), Modus (Mo), Median (Me), dan Standar Deviasi (SD). *Mean* merupakan rata-rata, modus merupakan nilai variabel atau data yang mempunyai frekuensi yang sering muncul dalam distribusi. Median adalah nilai yang membatasi 50% dari frekuensi distribusi sebelah atas dan 50% dari frekuensi distribusi sebelah bawah, sedangkan standar deviasi adalah akar *variance*. Selain itu, disajikan tabel distribusi frekuensi dan melakukan pengkategorian terhadap nilai masing-masing indikator. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program pengolah data. Deskripsi data masing-masing variabel secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Statistika Deskriptif Penelitian

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Profesionalisme	45	44	60	53.84	.659	4.421
Independensi	45	39	55	47.64	.696	4.667
GGG	45	44	70	60.76	.836	5.609
Valid N (listwise)	45					

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Sampel penelitian ini berjumlah 45, dengan variabel profesionalisme memiliki nilai minimum 44 dan maksimum 60, nilai rata-rata adalah 53,84, mediannya adalah 54, dengan modus 60 dan standar deviasinya adalah 4,421. Variabel Independensi dengan nilai minimum 39 dan maksimum 55, nilai rata-ratanya adalah 47,64, mediannya adalah 46, dengan nilai modus adalah 44 dan standar deviasi 4,667. Untuk variabel *Good Government Governance* (GGG) nilai minimum 44 dan maksimum 70, nilai rata-rata 60,76, nilai median adalah 60, dengan nilai modus adalah 56 dan standar deviasi 5,609.

Analisis Uji Instrumen Penelitian

Analisis Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu uji dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Oleh karena itu, suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan objek yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalisme

Indikator	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	R tabel	Sig.	Keterangan
X1.1	0,612	0,000	0,301	0,05	Valid
X1.2	0,547	0,000	0,301	0,05	Valid
X1.3	0,583	0,000	0,301	0,05	Valid
X1.4	0,606	0,000	0,301	0,05	Valid
X1.5	0,549	0,000	0,301	0,05	Valid
X1.6	0,697	0,000	0,301	0,05	Valid
X1.7	0,781	0,000	0,301	0,05	Valid
X1.8	0,628	0,000	0,301	0,05	Valid
X1.9	0,789	0,000	0,301	0,05	Valid
X1.10	0,657	0,000	0,301	0,05	Valid
X1.11	0,786	0,000	0,301	0,05	Valid
X1.12	0,654	0,000	0,301	0,05	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation*, yaitu dengan cara menguji korelasi antara skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0.301 ke atas maka faktor tersebut merupakan *construct* yang kuat atau valid. Cara kedua dengan membandingkan Sig (2-tailed) dengan nilai signifikan 0,05, bila nilai sig (2-

tailed) < Sig maka *construct* dikatakan juga valid.

Berdasarkan Tabel 2 seluruh indikator profesionalisme yang digunakan dinyatakan valid, setelah dilakukan uji validitas, data yang valid dapat dilakukan uji reliabilitas,

Tabel 3

Hasil Uji Validitas Variabel Independensi

Indikator	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	R tabel	Sig.	Keterangan
X2.13	0,649	0,000	0,301	0,05	Valid
X2.14	0,562	0,000	0,301	0,05	Valid
X2.15	0,726	0,000	0,301	0,05	Valid
X2.16	0,771	0,000	0,301	0,05	Valid
X2.17	0,739	0,000	0,301	0,05	Valid
X2.18	0,686	0,000	0,301	0,05	Valid
X2.19	0,654	0,000	0,301	0,05	Valid
X2.20	0,787	0,000	0,301	0,05	Valid
X2.21	0,745	0,000	0,301	0,05	Valid
X2.22	0,710	0,000	0,301	0,05	Valid
X2.23	0,774	0,000	0,301	0,05	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Berdasarkan hasil uji validitas variabel independensi auditor internal, menunjukkan *Pearson Correlation* > r tabel berarti semua indikator pernyataan dikatakan valid. Cara kedua bisa dilihat dari Sig (2-tailed) < dari nilai Sig 0,05 juga bisa dinyatakan seluruh indikator pernyataan dikatakan valid.

Jadi seluruh indikator pernyataan variabel independensi dinyatakan valid, instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk uji reliabilitas.

Tabel 4

Hasil Uji Validitas Variabel *Good Government Governance*

Indikator	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	R tabel	Sig.	Keterangan
Y.24	0,649	0,000	0,301	0,05	Valid
Y.25	0,562	0,000	0,301	0,05	Valid
Y.26	0,726	0,000	0,301	0,05	Valid
Y.27	0,771	0,000	0,301	0,05	Valid
Y.28	0,739	0,000	0,301	0,05	Valid
Y.29	0,686	0,000	0,301	0,05	Valid
Y.30	0,654	0,000	0,301	0,05	Valid
Y.31	0,787	0,000	0,301	0,05	Valid
Y.32	0,745	0,000	0,301	0,05	Valid
Y.33	0,710	0,000	0,301	0,05	Valid
Y.34	0,774	0,000	0,301	0,05	Valid
Y.34	0,696	0,000	0,301	0,05	Valid
Y.35	0,608	0,000	0,301	0,05	Valid
Y.36	0,742	0,000	0,301	0,05	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Berdasarkan hasil uji validitas *bivariate*, diperoleh hasil *Pearson Correlation* di atas lebih besar dari r tabel (0,301) dan nilai Sig (2-tailed) lebih kecil dari signifikan 0,05. Keempat belas pernyataan variabel *good government governance* dinyatakan telah memenuhi syarat validitas.

Keseluruhan pernyataan kuesioner dari ketiga variabel diatas dikatakan valid, dan layak dilakukan uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas.

Analisis Uji Reliabilitas

Indikator pernyataan dari kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Kuesioner yang dikumpulkan dan sah untuk dianalisis, selanjutnya dilakukan pengelompokan untuk *item* pernyataan yang diajukan dan menentukan nilai masing-masing variabel dari sejumlah pernyataan digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Perhitungan reliabilitas ini dilakukan dengan metode *Cronbach's Alpha*. Jika hasil dari *Cronbach's Alpha* di atas 0,70 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha Standard	Keterangan
Profesionalisme	0,875	0,7	Reliabel
Independensi	0,898	0,7	Reliabel
Good Government Governance	0,928	0,7	Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data, (Lampiran, 2022)

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa pengujian reliabilitas pada variabel-variabel menunjukkan masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7. Hal ini dapat membuktikan bahwa semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel atau dapat diandalkan.

Analisis Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Data pengujian normalitas *Kolmogorov-Smirnov* lewat spss 26 ditampilkan di lampiran, untuk hasil pengujian uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Monte-Carlo Signifikan	Asymp. Sig. (2-tailed)	Test Statistik Kolmogorov-Smirnov	Taraf Signifikan	Kesimpulan
0,559	0,165	0,115	0,05	Normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 6, pengujian data berdistribusi normal yaitu jika besarnya nilai test statistik *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,115 dan nilai *Monte Carlo* signifikannya 0,559 yang berarti H_0 diterima bisa dijelaskan data terdistribusi normal, pengamatan yang kedua dengan melihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Hasilnya H_0 diterima dan data terdistribusi secara normal juga.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan korelasi antara satu variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018).

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Profesionalisme	0,577	1,734	Tidak terjadi multikolinieritas
Independensi	0,577	1,734	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa variabel profesionalisme dan independensi memiliki nilai *tolerance* dan VIF yang sama yaitu 0,577 dan 1,734. Kedua variabel tersebut memiliki nilai *tolerance* di atas 0,1 dan VIP dibawah 10. Maka dapat disimpulkan dari hasil tersebut tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dan data tersebut dapat dinyatakan bebas dari masalah multikolinieritas dalam model regresinya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. (Sujarweni 2016: 232), selain itu menurut Ghazali (2018:137) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan uji *Glejser*.

Tabel 8
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-7.620	4.966		-1.535	.132
1 Profesionalisme	.163	.118	.267	1.387	.173
Independensi	.040	.111	.069	.356	.724

a. Dependent Variable: Res2

Sumber : Data primer yang diolah dari SPSS 26, 2022

Dari tabel 8 profesionalisme memiliki nilai hitung signifikan adalah 0,173, dan independensi memiliki nilai hitung signifikan adalah 0,724. Kedua variabel tersebut tidak memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas antar kedua variabel independen.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model Regresi

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme auditor internal, dan Independensi auditor internal, terhadap *Good Government Governance* di Pemerintahan Provinsi Bali. Berikut hasil analisis uji regresi linier berganda:

Tabel 9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.372	7.946		1.809	.078
1 Profesionalisme	.392	.188	.309	2.082	.043
Independensi	.531	.178	.442	2.981	.005

a. Dependent Variable: GGG

Sumber : Data primer yang diolah dari SPSS 26, 2022

Persamaan regresi yang didapat dari analisis data pada tabel 9 adalah sebagai berikut :

$$GGG = 14,372 + 0,392 \text{ Profesionalisme} + 0,531 \text{ Independensi} + e$$

Dalam persamaan regresi linier berganda

$$Y = 14,372 + 0,392 X_1 + 0,531 X_2 + e$$

Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018:97), uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.684 ^a	.468	.442	4.188

a. Predictors: (Constant), Independensi, Profesionalisme
b. Dependent Variable: GGG

Sumber : Data primer yang diolah dari SPSS 26, 2022

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R²* yaitu sebesar 0.468, menunjukkan bahwa *good government governance* dapat dijelaskan dengan variabel profesionalisme dan independensi sebesar 46,8 % sementara sisanya sebesar 53,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji t (Uji hipotesis)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan taraf signifikansi hitung dengan nilai taraf kepercayaan (α). Jika nilai taraf signifikansi hitung > taraf kepercayaan (α), maka variabel bebas secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan, jika nilai taraf signifikansi hitung < taraf kepercayaan (α), maka variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Taraf kepercayaan (α) yang digunakan penelitian ini adalah 5%. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11
Hasil Uji t

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	14.372	7.946		1.809	.078		
1 Profesionalisme	.392	.188	.309	2.082	.043	.577	1.734
Independensi	.531	.178	.442	2.981	.005	.577	1.734

a. Dependent Variable: GGG

Sumber: Data primer yang diolah dari SPSS 26, 2022

Dari data di atas dapat dilihat nilai t variabel profesionalisme adalah 2.082 dengan nilai signifikan hitung adalah 0,043 ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai taraf signifikan (α) yaitu 0,05, artinya variabel profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *good government governance*. Untuk variabel independensi nilai t adalah 2.981 dengan nilai signifikan hitung adalah 0,005 ini lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikan (α) yaitu 0,05, artinya

artinya variabel independensi berpengaruh signifikan terhadap variabel good government governance

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Good Government Governance Di Pemerintahan Provinsi Bali

Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel profesionalisme memiliki nilai signifikan hitung yaitu 0,043 ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai taraf signifikan (α) yaitu 0,05, artinya variabel profesionalisme berpengaruh positif terhadap *good government governance*. Interpretasi hasil uji analisis regresi berganda di atas menunjukkan bahwa dengan meningkatnya profesionalisme seorang auditor internal akan mempengaruhi *good government governance* di Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil dari hipotesis awal H1: Profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Good Government Governance*, setelah diverifikasi hasil penelitian ternyata hipotesis awal dengan hasil itu sejalan, dan sesuai dengan yang diungkapkan oleh penelitian terdahulu, seperti yang diungkapkan oleh (Rachmadias, F dan Fury Fitriyah, 2019) menjelaskan adanya pengaruh profesionalisme yang signifikan terhadap *good corporate governance* di 5 BUMN yang ada di Bandung, dengan begitu pengelolaan perusahaan tersebut sudah berjalan dengan baik. Selain itu (Budiningsih dkk, 2016) mengungkapkan bahwa profesionalisme auditor internal berpengaruh signifikan terhadap *good corporate governance* di BPR yang ada di Jawa Tengah. Peneliti lainnya Noviatini dan Rahayu juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara profesionalisme auditor internal dengan efektivitas *good corporate governance* di PT Pos Indonesia Bandung.

Teori atribusi menurut Fritz dan Heider menjelaskan terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Teori atribusi ini juga menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang ditentukan oleh faktor internal seperti sifat, karakter, sikap dan lain-lain serta faktor eksternal seperti tekanan situasi dan atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Seorang auditor yang memiliki sikap profesionalisme akan melaksanakan tugas sebagai pengawas dan pemeriksa di lingkup internal sesuai dengan kemampuan, kompetensi, obyektifitas dan memegang teguh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Auditor yang memiliki sikap profesional akan memberikan pendapat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan.

Auditor internal harus memiliki profesionalisme, profil, dan kemandirian untuk memenuhi perannya secara efektif. auditor internal harus mampu menyediakan tantangan lingkungan pelaporan, transparansi, dan jujur ke tingkat tertinggi tanpa rasa takut dan retribusi. Audit internal harus terfokus pada risiko organisasi. Hal ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang operasi organisasi bersama-sama dengan komunikasi dan keterampilan persuasi untuk mendapatkan pesan (Lubis, 2017: 495). Auditor yang independen tentunya diharapkan oleh masyarakat umum dalam mengawasi dan memeriksa pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali terkait dengan teori keagenan, masyarakat dikatakan sebagai *principal* dan Pemerintah Daerah sebagai agen dalam eksekusi dan pelaksana pengelola anggaran daerah.

Pengaruh Independensi Auditor terhadap Good Government Governance

Dari hasil analisis verifikatif di atas yang dijelaskan bahwa variabel independensi memiliki nilai signifikan hitung yaitu 0,005 ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai taraf signifikan (α) yaitu 0,05, artinya variabel independen berpengaruh positif terhadap *good government governance*. Interpretasi hasil uji analisis regresi berganda di atas menunjukkan bahwa dengan meningkatnya independensi seorang auditor internal akan mempengaruhi *good government governance* di Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Dilihat dari hipotesis H2: Independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good government governance*. Setelah diuji dan dianalisis verifikatif hasil penelitian, ternyata hipotesis awal dengan hasil itu sejalan, dan sesuai dengan penelitian terdahulu oleh (Rachmadias, F dan Fury Fitriyah, 2019) mengungkapkan adanya pengaruh Independensi yang signifikan terhadap *good corporate governance* di 5 BUMN yang ada di Bandung, Lebih lanjut dijelaskan oleh

(Budiningsih dkk, 2016) Independensi Auditor Internal berpengaruh signifikan terhadap *good corporate governance* di BPR yang ada di Jawa Tengah, dan hasil penelitian dari (Sumadyo,2010) menyatakan bahwa independensi Auditor Internal berpengaruh signifikan terhadap *good corporate governance*.

Teori atribusi menurut Fritz dan Heider menjelaskan terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Teori atribusi ini juga menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang ditentukan oleh faktor internal seperti sifat, karakter, sikap dan lain-lain serta faktor eksternal seperti tekanan situasi dan atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Independensi merupakan aspek penting bagi seorang auditor internal dalam pembentukan integritas pribadi yang tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan masyarakat, yang meletakkan kepercayaan terhadap auditor internal pemerintahan dengan berani menciptakan transparansi dan kebebasan dari intervensi atas pengawasan dan pemeriksaan pada suatu organisasi Pemerintahan Daerah. Independensi yang tinggi tidak akan mudah terpengaruh oleh pihak dengan harapan menciptakan *good government governance* pada Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.

Auditor yang independen tentunya diharapkan oleh masyarakat umum dalam mengawasi dan memeriksa pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali terkait dengan teori keagenan, masyarakat dikatakan sebagai *principal* dan Pemerintah Daerah sebagai agen dalam eksekusi dan pelaksana pengelolaan anggaran daerah.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan data pengujian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan : (1) Profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good government governance* di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali. Semakin tinggi profesionalisme seorang auditor maka akan meningkatkan *good government governance* di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali. (2) Independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good government governance* di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali. Semakin tinggi independensi seorang auditor maka akan meningkatkan *good government governance* di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini bagi peneliti selanjutnya antara lain: (1) Menambahkan variabel bebas seperti integritas, audit kepatuhan, etika profesi auditor internal, dan lain-lain sedangkan untuk variabel moderasi atau intervening adalah fungsi audit internal, pencegahan kecurangan (*fraud*), dan ketaatan organisasi audit internal.2) Untuk kepustakaan baik buku maupun jurnal peneliti selanjutnya diharapkan dapat meminjam atau mengutip langsung dari buku pedoman yang ada di Inspektorat Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. (2016). Pengaruh Efektivitas Fungsi Audit Internal terhadap Penerapan Good Government Governance di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. In *Thesis Program Magister Ilmu Akuntansi FEB Universitas Bandar Lampung* (Vol. 23, Issue 45).
- Azizah Nuraeni Budiningsih, Inayah Adisari, dan A. M. (2016). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme, Dan Peran Auditor Internal terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Empiris BPR di Jawa Tengah). *Permana*, VIII No 1, 37–50.
- Faris Rachmadias, dan F. (2019). Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Badan Umum Milik Negara (Bumn) Wilayah Kota Bandung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fiedler, B., Elder, R., & Beasley, M. (2012). *Auditing, Assurance Services And Ethics In Australia-An Integrated Approach* (8th editio). Pearson.

- Indra, D. (2019). *Pemprov Bali Ingin Wujudkan Reformasi Birokrasi Secara Substansial*.
- Luthans, F. (2005). *Organizational Behaviour* (10th edisi). Andi.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mulyadi. (2014). *Akuntansi Biaya* (5th ed.). univeritas Gajah Mada.
- Rahmatika, N. (2014). *Factors Influencing The Quality Of Financial Reporting And Its Implications On Good Government Governance (Research on Local Government Indonesia)*. 5(1), 111–121.
- RI, P. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Peraturan Pemerintah*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Sumadyo, D. (2010). Pengaruh Independensi Auditor Internal Dan Komite Audit Terhadap Good Corporate Governance. *Good Corporate Governance*, 9(1), 76–99.
- Undang-Undang No.28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.